

RINGKASAN BERITA HARI INI

Wabup Ajukan Usulan Penanganan Banjir dan Betonisasi Jalan

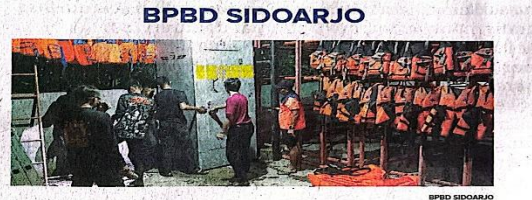
KOTA-Persoalan jalan berlubang dan banjir yang belum tuntas menjadi sorotan dalam kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Jawa Timur, Senin (23/2). Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, secara langsung menyampaikan berbagai keluhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur



RESPONS CEPAT: Bupati Sidoarjo Subandi (dua dari kiri) saat mengecek kondisi bangunan yang ambruk di SMPN 1 Gedangan, Selasa (24/2).

Atap Kelas SMPN 1 Gedangan Ambruk

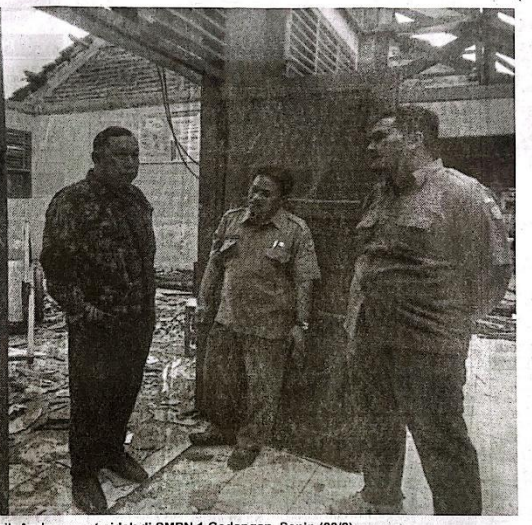
Bupati Instruksikan Perbaikan Cepat
Gedangan-Pendidikan di Sidoarjo tidak boleh terganggu hanya karena kerusakan infrastruktur. Bupati Subandi telah mengeluarkan perintah agar perbaikan dilakukan secepatnya.



SIAGA BENCANA: Petugas BPBD Sidoarjo mengecek peralatan di Posko Hidrometeorologi kemarin (24/2).

Siagakan Posko Hidrometeorologi Selama Ramadan

SIDOARJO - Langkah antisipasi bencana banjir di bulan Ramadan dilakukan BPBD Sidoarjo. Agar bisa bergerak cepat, BPBD menyiapkan Posko Hidrometeorologi yang diaktifkan selama



Warhi Andono saat duduk di SMPN 1 Gedangan, Senin (23/2). foto: ist

Warhi Minta Dikbud Petakan Sekolah Rawan Roboh

Sidoarjo - HARIAN BANGSA - Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warhi Andono meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat melakukan pemetaan terhadap gedung sekolah yang rawan roboh. Ini disampaikan saat Warhi Andono melakukan sidak di SMPN 1 Gedangan, yang salah satu atap ruang kelasnya ambruk, Senin (23/2). Politisi Partai Golkar ini sangat prihatin atas musibah ambruknya bangunan ruang kelas ini. Ia menyebut, peristiwa ini seharusnya tidak terjadi kalau Dinas Dikbud bisa mengantisipasi. "Artinya ada macing (pendataan) bangunan ruang kelas yang rawan ambruk dan mengawatirkannya," tandas Warhi Andono. Warhi menegaskan, hasil sidak di lokasi, kerusakan bangunan ruang kelas itu, murni disebabkan oleh faktor usia dan kondisi fisik material bangunan. Karena itu, Warhi Andono menekankan beberapa poin penting sebagai langkah tindak lanjutnya. Diantaranya mendorong Pemkab untuk pengecekan menyeluruh terhadap gedung-gedung sekolah lain yang sudah berumur. Hal itu, untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. "Kalau dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tidak bisa maka baru bisa dianggarkan di Tahun 2027. Karena rehav ruang kelas itu tidak hanya satu ruang saja akan tetapi sampai empat ruang kelas," tandasnya. (sta/rus)

PARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO

Periode 2024-2029



Abdillah Nashir, SM Ketua DPRD Sidoarjo

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Mimik Idayana, menyampaikan berbagai keluhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Ia juga meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kondisi jalan dan fasilitas publik lainnya.

Pimpinan DPRD Sidoarjo Minta OPD Pantau Harga Pangan saat Puasa hingga Lebaran

SIDOARJO-Pimpinan DPRD Sidoarjo meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memantau kondisi harga pangan menjelang bulan puasa hingga Lebaran. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nashir, di ruang kerjanya, Selasa (24/2). Nashir mengatakan, menjelang bulan puasa hingga Lebaran, harga pangan cenderung meningkat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh OPD untuk melakukan pantauan harga pangan di pasar-pasar tradisional dan modern. "Kita harus memastikan bahwa harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya. Nashir juga meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kondisi pasar-pasar tradisional dan modern. "Kita harus memastikan bahwa harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

Pemkab Sidoarjo Optimalisasi E-Purchasing

Sidoarjo - HARIAN BANGSA - Pemkab Sidoarjo berkomitmen memperkuat transparansi pengadaan barang dan jasa melalui optimalisasi metode e-purchasing. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan daerah sekaligus menekan risiko penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pengawasan itu disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi dalam High Level Meeting (HLM) terkait Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Selasa (23/2). Acara ini dihadiri oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susanto, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah. Bupati Subandi saat acara terkait pengadaan barang dan jasa. foto: ist



Baru Dibangun dengan APBN, Atap Teras Kelas SMK Ma'arif Tanggulangin Ambrol



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO

Periode 2024-2029



Pimpinan DPRD Sidoarjo Minta OPD Pantau Harga Pangan saat Puasa hingga Lebaran

SIDOARJO-Pimpinan DPRD Sidoarjo meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan harga bahan pangan menjelang bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok masyarakat tetap aman.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menegaskan bahwa momentum Ramadan dan Lebaran hampir selalu diiringi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan masyarakat, distribusi yang terdampak, hingga faktor cuaca yang memengaruhi hasil panen.

"Setiap tahun kita menghadapi pola yang hampir sama. Menjelang puasa dan Lebaran, harga beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam, hingga cabai cenderung naik. Karena itu, kami minta OPD terkait, terutama dinas yang membidangi perdagangan dan pangan, benar-benar melakukan pemantauan rutin di pasar-pasar tradisional maupun modern," ujar Nasih.

la menekankan, pengawasan tidak cukup hanya sebatas pendataan harga, tetapi juga harus diikuti langkah konkret jika dite-

mukan lonjakan harga yang tidak wajar. DPRD, lanjutnya, tidak ingin masyarakat terbebani oleh kenaikan harga yang signifikan di tengah meningkatnya kebutuhan selama Ramadan.

"Kalau ada lonjakan yang tidak rasional, harus segera diintervensi. Bisa melalui operasi pasar, pasar murah, atau koordinasi dengan distributor dan Bulog. Jangan sampai masyarakat kecil yang paling terdampak," tegasnya.

Menurut Nasih, stabilitas harga pangan merupakan bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Apalagi saat Ramadan, kebutuhan rumah tangga meningkat, mulai dari bahan makanan hingga kebutuhan pendukung lainnya. Jika harga melambung tinggi, maka beban ekonomi warga akan semakin berat.

Selain itu, ia juga meminta OPD untuk memastikan distribusi barang tidak terhambat. Koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah provinsi dan pusat, perlu diperkuat agar pasokan tetap lancar. "Distribusi harus dipastikan aman. Jangan sampai ada kelangkaan yang justru memicu spekulasi dan penimbunan," imbuhnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih

Andono, menyoroti pentingnya pengawasan langsung di lapangan. Ia mendorong dinas terkait untuk rutin turun ke pasar-pasar tradisional guna berdialog dengan pedagang dan pembeli.

"Jangan hanya menunggu laporan di meja. Harus ada sidak atau pemantauan langsung ke pasar. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kondisi riil di lapangan, apakah stok aman, apakah harga masih dalam batas wajar, atau sudah mulai merangkak naik," kata Warih.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi harga kepada publik juga perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan media sosial maupun kanal resmi untuk memperbarui informasi harga bahan pokok secara berkala. Dengan informasi yang transparan, masyarakat dapat merencanakan belanja dengan lebih bijak.

Warih juga mengingatkan potensi praktik penimbunan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan momen Ramadan untuk meraup keuntungan berlebih. Untuk itu, ia meminta aparat penegak hukum turut dilibatkan dalam pengawasan distribusi bahan pokok.

"Kalau ada indikasi penimbunan atau permainan harga, ha-



Abdillah Nasih, SM
Ketua DPRD Sidoarjo



Warih Andono
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo



Kayan
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo

rus ditindak tegas. Ini menyakit hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak boleh kalah dengan spekulasi," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan, menekankan pentingnya langkah antisipatif sejak dini. Menurutnya, pemantauan harga tidak hanya dilakukan saat harga sudah melonjak, tetapi harus dimulai beberapa minggu sebelum Ramadan.

"Kita harus belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kenaikan harga mulai terasa dua hingga tiga minggu sebelum puasa. Maka dari itu, OPD harus sudah memiliki peta potensi kenaikan harga dan strategi pengendaliannya," ujarnya.

Kayan juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan program pasar murah dan bazar sembako di berbagai kecamatan, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi.

Program tersebut dinilai efektif membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

"Pasar murah jangan hanya seremonial. Pastikan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan. Distribusinya harus merata dan informasinya jelas agar tidak menimbulkan antrian panjang atau keributan," katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, distributor, dan petani lokal. Dukungan terhadap produk pangan lokal, menurutnya, juga dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas pasokan.

"Kalau produksi lokal kita kuat, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah bisa dikurangi. Ini akan membantu menjaga harga tetap stabil," tambahnya.

Pimpinan DPRD Sidoarjo

sepakat bahwa pengendalian harga pangan merupakan tanggung jawab bersama. DPRD, sebagai lembaga legislatif, akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan hingga Lebaran.

Mereka berharap, dengan langkah antisipatif dan koordinasi yang solid, lonjakan harga yang memberatkan masyarakat dapat ditekan. Stabilitas harga pangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari menjaga ketenangan dan kekhayuk masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa.

"Ramadan adalah bulan ibadah. Jangan sampai masyarakat justru dibuat resah oleh harga kebutuhan pokok yang melonjak. Pemerintah daerah harus hadir memberikan rasa aman dan kepastian," pungkash Nasih.

● Ke Halaman 10



Pimpinan DPRD Sidoarjo...

Nasih berharap dalam momen Ramadan hingga Lebaran masyarakat bisa melaksanakan ibadah puasa dan Idulfit-

tri dengan baik. Sehingga suasana menjadi adem, ayem serta kondusif.

"Kami ingin suasana di Sidoarjo secara ekonomi social dan kemasyarakatan aman terkendali," pungkashnya. (*)





DIKY SANSIR/RADAR SIDOARJO

RESPONS CEPAT: Bupati Sidoarjo Subandi (dua dari kiri) saat mengecek kondisi bangunan yang ambruk di SMPN 1 Gedangan, Selasa (24/2).

Atap Kelas SMPN 1 Gedangan Ambruk

■ Bupati Instruksikan Perbaikan Cepat

GEDANGAN-Pendidikan di Sidoarjo tidak boleh terhenti hanya karena kayu yang lapuk. Itulah pesan tegas yang dibawa



Bupati Sidoarjo Subandi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMPN 1 Gedangan, Selasa (24/2) pagi. Kedatangannya dipicu oleh insiden ambruknya atap ruang kelas 9B yang terjadi pada Jumat (20/2) lalu.

● Ke Halaman 10



Atap Kelas SMPN 1...

Bupati Subandi tidak datang sendiri. Ia ditemani jajaran strategis, mulai dari Wakil Ketua DPRD Warih Andono, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BPBD, hingga tim Inspektorat. Langkah ini diambil untuk memastikan birokrasi tidak menghambat keselamatan siswa.

Menyadari bahwa menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) akan memakan waktu terlalu lama, Bupati menginstruksikan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk percepatan renovasi.

"Hari ini saya perintahkan segera dirapatkan. Kalau kita nunggu PAK, waktunya panjang. Anak-anak ini butuh sekolah, butuh dukungan pemerintah daerah," tegas Subandi.

Menurut Subandi, jika hasil kajian bisa memakai BTT, ia memerintahkan untuk segera dilakukan pengerjaan. "Kita percepat agar setelah Lebaran anak-anak bisa belajar dengan nyaman tanpa rasa khawatir," ungkapnya.

Bupati juga menyoroti kondisi bangunan yang memang sudah tidak layak. Penggantian rangka atap (diusulkan menggunakan baja ringan). Selain atap yang keropos dimakan usia,

peninggian lantai juga menjadi prioritas agar kegiatan belajar tidak terganggu banjir saat hujan deras.

"Kita ingin kerjanya sekalian, tidak dua kali. Atap diperbaiki, lantai ditinggikan. Soal anggaran, kita siapkan lewat BTT. Yang penting bangunannya bagus dan anak-anak bisa menikmati sekolah yang aman," tambahnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Gedangan, Aris Setiawan mengungkapkan, tanda-tanda kerusakan sebenarnya sudah terdeteksi sejak dua bulan lalu. Beruntung, pihak sekolah bergerak cepat mengosongkan ruangan sebelum

musibah terjadi, sehingga 35 siswa kelas 9B selamat dari reruntuhan.

"Atapnya sudah melengkung. Saat dicek, kayu penyangga di bagian wuwung sudah rapuh dimakan rayap. Karena usia gedung sudah lebih dari 15 tahun, banyak kayu yang lapuk, apalagi cuaca hujan lebat belakangan ini," ungkapnya.

Pimpinan DPRD Sidoarjo...

Nasib berharap dalam momen Ramadan hingga Lebaran masyarakat bisa melaksanakan ibadah puasa dan Idul-

Saat ini, siswa terpaksa mengungsi ke Laboratorium IPA. Namun, Aris mengaku khawatir karena kondisi kelas tetangga (9A, 9C, dan 9D) juga mulai menunjukkan gejala serupa.

"Rencananya siswa kelas lain yang kondisinya mengkhawatirkan juga akan kami pindahkan ke laboratorium komputer," terangnya. (dik/vga)

tri dengan baik. Sehingga suasana menjadi adem, ayem serta kondusif.

"Kami ingin suasana di Sidoarjo secara ekonomi sosial dan kemasyarakatan aman terkendali," pungkasnya. (*)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Wabup Ajukan Usulan Penanganan Banjir dan Betonisasi Jalan

KOTA-Persoalan jalan berlubang dan banjir yang belum tuntas menjadi sorotan dalam kunjungan kerja reses Komisi V DPR

RI ke Jawa Timur, Senin (23/2). Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, secara langsung menyampaikan

berbagai keluhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur

● Ke Halaman 10



Wabup Ajukan...

di Kabupaten Sidoarjo.

Kunjungan reses yang dipusatkan di Terminal Purabaya Sidoarjo dan Bandara Internasional Juanda itu tidak hanya membahas kesiapan angkutan Lebaran 2026.

Momentum tersebut juga dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengajukan sejumlah usulan strategis yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Di hadapan jajaran Komisi V DPR RI, Mimik menegaskan bahwa keluhan terkait infrastruktur dasar masih mendominasi aspirasi warga. Ia mengaku hampir setiap hari menerima laporan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak dan genangan banjir di sejumlah titik.

"Hampir tiap hari kami menerima telepon dari masyarakat terkait jalan berlubang dan banjir," tegasnya.

Menurut Mimik, kerusakan jalan tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga berisiko memicu kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, banjir yang kerap terjadi saat musim hujan dinilai menghambat mobilitas warga dan berdampak pada aktivitas perekonomian.

Dalam forum tersebut, ia mengajukan beberapa usulan konkret. Di antaranya percepatan penanganan banjir secara komprehensif, lanjutan betonisasi Jalan Raya Lingkar Timur, serta revitalisasi sejumlah bozem atau kolam retensi di beberapa wilayah rawan genangan di Sidoarjo.

"Apa yang kami usulkan itu merupakan kewenangan Kementerian PU. Kami berharap usulan tersebut bisa direalisasikan pada tahun 2026 dan seterusnya," ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar persoalan infrastruktur yang menjadi aspi-



KOORDINASI:
Wabup
Sidoarjo
Mimik Idayana
saat mengha-
diri reses
Komisi V DPR
RI di Terminal
Purabaya,
Senin (23/2).

sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan kolaborasi yang solid, ia optimistis program prioritas di sektor infrastruktur dapat tersalisasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Respons positif disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. Ia menegaskan komitmen Komisi V untuk menampung aspirasi dari daerah dan mendorong percepatan realisasi program pembangunan, khususnya di sektor yang menjadi mitra kerja Komisi V, seperti infrastruktur jalan dan transportasi. (dik/vga)

Modernisasi Pertanian,...

Acara ini juga dihadiri oleh Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, serta Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Supriyono, yang turut memberikan dukungan moril bagi para petani setempat. (dik/vga)



WABUP SIDOARJO DAN SEKDA PROV BAHAS PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI DI JATIM DENGAN KOMISI V

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Anggota DPR RI Komisi V memanfaatkan masa Reses nya dengan melakukan Kunjungan Kerja/Kunker ke Jawa Timur. Pagi tadi, puluhan anggota dewan itu mendatangi Terminal Purabaya yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Senin, (23/2). Kedatangan mereka untuk melihat infrastruktur terminal bus tipe A terbesar di Jawa Timur itu dalam menghadapi mudik lebaran nanti.

Kedatangan rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae disambut Sekdaprov Jatim Adhy Karyono serta Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana dan Direktur Prasarana Transportasi Jalan (DPTJ) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI Toni Tauladan. Setelah dari Terminal Purabaya, rombongan bertolak ke kantor Otoritas Bandara Wilayah III Juanda Sidoarjo untuk menggelar rapat koordinasi percepatan infrastruktur dan transportasi di Jatim. Dalam rapat tersebut juga dibahas dukungan anggaran, sinkronisasi program, serta percepatan realisasi proyek infrastruktur transportasi di Jawa Timur.

Sebelumnya Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengucapkan selamat datang kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI. Disampaikannya kunjungan kali ini menjadi moment strategis dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Sidoarjo. Ia berharap melalui kegiatan seperti ini akan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu lanjut Hj. Mimik, akan memperkuat terwujudnya program-program prioritas infrastruktur di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya mengucapkan selamat datang, semoga kunjungan kali ini akan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program-program prioritas infrastruktur di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sidoarjo yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," ucapnya.

Dalam kesempatan itu Wabup Hj. Mimik Idayana menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur di



wilayahnya. Seperti persoalan jalan rusak serta banjir yang masih dikeluhkan masyarakat. Ia mengungkapkan, hampir setiap hari menerima laporan terkait kondisi jalan berlubang serta banjir yang belum tertangani secara optimal.

Hampir tiap hari kami menerima telepon dari masyarakat terkait jalan berlubang dan banjir. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan yang hadir di ruang rapat ini. Kami berharap ada dukungan penuh atas keluhan masyarakat kami, serta kemudahan akses transportasi di Kabupaten Sidoarjo," ujar Wabup Hj. Mimik.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan komitmen Komisi V untuk menampung aspirasi daerah dalam percepatan realisasi program pembangunan. Dikatakannya Komisi V akan mendorong percepatan pembangunan di beberapa sektor yang menjadi kewenangannya. Seperti

pada sektor perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta pembangunan desa dan daerah tertinggal.

"Melalui forum rapat ini kami berharap kelas jalan baik, kabupaten, provinsi dan kelas jalan nasional tidak ada yang berlubang lagi. Sebab, misalnya terjadi lakalantas di area kelas jalan kabupaten yang bertanggungjawab bupati atau walikota, begitu juga provinsi dan nasional. Oleh sebab itu melalui rapat koordinasi ini kita tampung aspirasi masyarakat mana saja yang perlu kita dukung," ujarnya saat memimpin rapat.

Sementara itu Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyampaikan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai gerbang perekonomian kawasan Timur Indonesia. Oleh karenanya diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, khususnya dalam peningkatan kualitas dan kemandapan jalan nasional

maupun provinsi.

"Tingkat kemandapan jalan nasional di Jawa Timur saat ini mencapai sekitar 98 persen, sedangkan jalan provinsi berada di kisaran 86 persen," ucapnya.

Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Jatim akan mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran. Diproyeksikan akan ada pergerakan jutaan penumpang melalui moda transportasi darat, laut, dan udara. Adhy Karyono juga mengatakan Pemprov Jatim mendorong pengembangan transportasi massal di kawasan Surabaya Raya.

"Salah satu rencana strategis yang akan kita lakukan adalah proyek kereta rel listrik (KRL) Surabaya-Sidoarjo yang ditargetkan beroperasi pada 2027, serta pengembangan moda transportasi berbasis rel lainnya guna mengurai kemacetan dan memperkuat konektivitas kawasan metropolitan," ujarnya. (Khol/Dy)



POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



Pemkab Sidoarjo Perkuat Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Langkah Pemkab Sidoarjo dalam pengadaan barang dan jasa melalui optimalisasi metode e purchasing. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan daerah sekaligus menekan risiko penyimpangan dalam proses lelang.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Sidoarjo, H. Subandi, dalam High Level Meeting (HLM) terkait kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pendopo Delta Wibawa, Senin (23/2/2026).

Acara ini dihadiri oleh Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kesempatan itu, Bupati Subandi menekankan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, metode e-purchasing kini menjadi prioritas yang wajib didahulukan sebelum menggunakan metode pengadaan lainnya.

“Strategi pengadaan menjadi krusial. Kita perlu menyamakan persepsi agar strategi yang dipilih efisien, tepat sasaran, dan sesuai regulasi. E-purchasing adalah instrumen utama untuk mempercepat pembangunan dan menumbuhkan ekonomi daerah,” ujar Subandi.

Ia juga mengingatkan bahwa seluruh pelaku pengadaan—mulai dari Pengguna Anggaran (PA) hingga penyedia—harus bekerja sinergis. Menurutnya, kegagalan salah satu unsur dalam rantai pengadaan akan menghambat pelayanan publik secara keseluruhan.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig, memaparkan potret pengadaan tahun anggaran 2026.

Hingga saat ini, tercatat ada 114 paket tender konstruksi senilai Rp 315,5 miliar dan 638 paket pengadaan langsung senilai Rp 138,6 miliar. (Khol/Dy)

Perbaiki SMPN 1 Gedangan Pakai Dana Belanja Tidak Terduga

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Subandi meninjau langsung kondisi kelas SMPN 1 Gedangan yang rusak kemarin (24/2). Tidak saja berdiskusi dengan perwakilan sekolah. Subandi juga meminta sekolah segera diperbaiki.

Menurut Subandi, siswa memerlukan ruang yang nyaman untuk belajar. Sehingga pembangunan harus dipercepat. Solusinya, Pemkab akan melakukan perbaikan dengan skema Belanja Tidak Terduga (BTT). "Tidak perlu menunggu lama, setelah hasil kajian selesai langsung kerjakan. Kita percepat," katanya kemarin (24/2).

Subandi menjelaskan jika ada petonsi kerusakan susulan. Sehingga perbaikan harus dilakukan cepat. "Kalau tidak segera diperbaiki bahaya bagi anak-anak. Kayunya sudah rapuh dimakan rayap," ujarnya.

Tinggikan Lantai

Selain mengganti atap, Pemkab juga akan meninggikan lantai. Sebab sekolah kerap terdampak banjir saat hujan deras. Subandi meminta perencanaan dilakukan matang agar pekerjaan tidak dilakukan dua kali.

Terkait anggaran, estimasi awal disebut sekitar Rp 250 juta per ruang. Namun angka tersebut masih dalam tahap kajian, menyesuaikan spesifikasi material dan kondisi bangunan. Subandi juga berencana



ANGGER BONDAN/JAWA POS



PERCEPAT RENOVASI:

Bupati Sidoarjo (dua dari kiri) bersama Kepala Dinas Dikbud Tirta Adi (kiri) mengecek potongan kayu dari atap SMPN 1 Gedangan. Foto kiri, tampak kayu penyangga genteng yang sudah lapuk.

mendata ulang terhadap bangunan sekolah yang sudah berusia tua

agar potensi kerusakan bisa terdeteksi lebih dini. (ful/hen)

Jawa Pos



Pemkab Sidoarjo Optimalisasi E-Purchasing

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo berkomitmen memperkuat transparansi pengadaan barang dan jasa melalui optimalisasi metode epurchasing.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan daerah sekaligus menekan risiko penyimpangan dalam proses lelang.

Penegasan itu disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi dalam High Level Meeting (HLM) terkait *kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* di Pendopo Delta Wibawa, Senin (23/2).

Acara ini dihadiri Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah



Bupati Subandi saat acara terkait pengadaan barang dan jasa. foto diskominfo

(OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Dalam kesempatan itu, Bupati Subandi menekankan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, metode e-purchasing kini menjadi prioritas yang wajib didahulukan sebelum menggunakan metode pengadaan lainnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig, memaparkan potret pengadaan tahun anggaran 2026.

Hingga saat ini, tercatat ada 114 paket tender konstruksi senilai Rp 315,5 miliar dan 638 paket pengadaan langsung senilai Rp 138,6 miliar. Adapun pengadaan melalui e-purchasing telah mencapai 6.848 paket dengan total nilai Rp 665,9 miliar. (sta/rus)

Pemkab Optimalkan E-Purchasing Perkuat Transparansi Pengadaan

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen memperkuat transparansi pengadaan barang dan jasa melalui optimalisasi metode e-purchasing. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan daerah sekaligus menekan risiko penyimpangan dalam proses lelang.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Sidoarjo, H. Subandi, dalam High Level Meeting (HLM) kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pendopo Delta Wibawa, Senin (23/2/26).

Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Patria Susantosa serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Dalam kesempatan itu, Subandi menekankan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, metode e-purchasing menjadi prioritas yang wajib didahulukan sebelum menggunakan metode pengadaan lainnya.

"Strategi pengadaan menjadi krusial. Kita perlu menyama-

kan persepsi agar strategi yang dipilih efisien, tepat sasaran, dan sesuai regulasi. E-purchasing adalah instrumen utama untuk mempercepat pembangunan dan menumbuhkan ekonomi daerah," ujarnya dalam kegiatan Senin sore (23/2/26).

Sementara itu, Asisten Perencanaan dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig, memaparkan hingga tahun anggaran 2026 tercatat 114 paket tender konstruksi senilai Rp315,5 miliar dan 638 paket pengadaan langsung senilai Rp138,6 miliar.

Adapun pengadaan melalui e-purchasing telah mencapai 6.848 paket dengan total nilai Rp665,9 miliar.

Amig menambahkan, sistem E-Katalog versi 6 yang dikembangkan LKPP telah memfasilitasi produk jasa konstruksi. Ia juga menyoroti sejumlah kendala lapangan seperti pemutusan kontrak dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan di masa lalu.

"Melalui arahan Bupati dan LKPP, diharapkan tata kelola penganggaran dan pengadaan di Sidoarjo semakin akuntabel serta mampu meminimalkan potensi permasalahan hukum di masa mendatang," ungkapnya. ● Loe



(LOETFI/DUTA)

High Level Meeting (HLM) kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pendopo Delta Wibawa, Senin (23/2/26)

Beranda > Politik & Legislatif >

Politik & Legislatif

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Berikan Solusi Akses Jalan Karangbong

Redaksi 5 Min Baca
24 Februari 2026



Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, – Wakil Ketua DPRD Sidoarjo berikan solusi akses jalan Karangbong. Rapat koordinasi terkait akses jalan Desa Karangbong yang digelar di Kantor Kecamatan Gedangan, Senin (23/2/2026), Pertemuan yang mewajibkan kehadiran pimpinan 10 perusahaan besar dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Warih Andono, SH, dalam pembahasan mengenai teknis dan sumber pendanaan infrastruktur.

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Warih Andono, menawarkan solusi penggunaan dana Pokok Pikiran (Pokir) untuk betonisasi jalan. Namun, tawaran politisi Golkar ini disertai catatan agar pihak perusahaan turut berkontribusi dalam pembangunan plengsengan sungai di wilayah terdampak.

Alih-alih menyambut baik, pihak perusahaan justru menyatakan keberatan atas beban pembangunan plengsengan tersebut. Pihak industri secara mengejutkan hanya meminta perbaikan jalan berupa pavingisasi dan menyarankan agar dana Pokir dialihkan sepenuhnya untuk pembangunan plengsengan sungai. Kontradiksi ini memicu kekhawatiran warga akan daya tahan jalan terhadap armada besar perusahaan jika hanya menggunakan paving tanpa standar industri.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Warih Andono, S.H., menyampaikan kepada Reporter Arjunanusantaranews.com, bahwa di Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo ini ada sepuluh perusahaan, hari ini kami ada pertemuan dalam rangka untuk memberikan solusi jalan industri, jadi awal kami menawarkan solusi kepada perusahaan- perusahaan itu, apa, supaya jalan di Karangbong tidak macet, berarti harus ada pembangunan jalan industri yang ada di Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Sidoarjo.



Solusi yang saya berikan diawal, saya akan memberikan Pokok pikiran (Pokir) untuk kegiatan betonisasi. Kami memberikan penawaran, Kemudian penahan sungai plengsengan biar di kolaborasi partisipasi perusahaan, itu yang kami tawarkan kepada teman- teman dari perusahaan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



News
Berita Daerah Nusantara Pemerintahan Pembangunan Pendidikan Kesehatan

Tetapi didalam diskusinya panjang menjadi suatu beberapa perubahan, dan Pokirnya diminta untuk plengsengan tetapi perusahaan akan melakukan pavingisasi dan peninggian jalan paving. Jadi kita akan melakukan pertemuan kembali nanti.

Apakah paving untuk jalan industri itu kuat? Warih pun menjawab ya itu masih perlu dipertimbangan oleh perusahaan. Dan yang meminta paving itu perusahaan dan kami pemerintah,dari DPR, yang kuat itu betonisasi, sudah maksimal kemudian dibalik Pokir dibagi untuk plengsengan dan teman-teman perusahaan melakukan pavingisasi dan peninggian jalan, itupun sudah ada sebagian paving, kemungkinan mereka mencari yang paling murah, ungkap Warih.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo berikan solusi akses jalan Karangbong. Dari Perusahaan Astra Otoparts Tbk, yang diwakili Narso Samsudin sebagai kepala Gudang telah menyampaikan bahwa dalam rapat hari ini telah di sepakati ada biaya – biaya yang harus dikeluarkan, dari Pak Warih Wakil DPRD Sidoarjo sepakat akan membantu proses dan Bulcaverd untuk plengsengan, dan untuk pavingisasi akan dibantu oleh pihak perusahaan.



Untuk pertama kali yang dipertanggung jawabkan itu didepan perusahaan masing – masing, rencana akan dilaksanakan pembangunan pada tahun 2027,dana dari Pak Warih (Pokir) akan dipakai untuk pembangunan itu. Perusahaan sendiri sebenarnya mendukung rencana ini, dan telah disertai tanggung jawab di depan perusahaan masing-masing wajib untuk di paving.

Rencana akan kita bersihkan dari timur ke barat jalan itu untuk warga, seperti yang di sampaikan Kades Karangbong dalam rapat tadi bahwa sementara jalan itu bisa dibuat sebagai jalan alternatif dan kalau memang jalan utama ada kemacetan. Biaya akan dialihkan kesitu kalau untuk biaya betonisasi terlalu banyak.

Itu bisa menjadi solusi kalau memang difungsikan, karena nanti banyak hal yang akan dilakukan dari Kecamatan, karena disitu ada banyak bangunan- bangunan liar yang mau ditertibkan, kemudian plengsengan dibangun, paving juga kita bangun sepertinya cukup lebar jalan alternatif untuk warga, dan pelaksanaan di Tahun 2027 itu cukup ideal, tegas Narso.

Begitu juga dari Kades Karangbong Moch. Bambang Asmuni, S.H., juga menyampaikan Pada intinya kalau hal ini dilaksanakan dengan Pokirnya sangat membantu masyarakat desa Karangbong. Panjangnya 1.3 km dan waktu itu yang di ajukan untuk plengseng dan paving, sekarang untuk betonisasi nanti khawatirnya perusahaan enggan untuk merawat. Tetapi kalau paving nanti diserahkan perusahaan barangkali ada rusaknya atau apa, perusahaan yang merawat.



Jadi maunya mereka pavingisasi dan perawatannya,untuk skemanya jalan masuk





Jadi maunya mereka pavingisasi dan perawatannya, untuk skemanya jalan masuk ke perusahaan yang sebelah selatan dan jalan keluar tetap dibatasi, jam waktu untuk masuk, kami batasi jam 09.00 s/d jam 16.00, dan jam 16.00 s/d jam 21.00, jelas Asmuni.

Sementara Camat Gedangan Asmara Hadi, S. STP, M. AP., menjawab pertanyaan terkait dengan banyaknya bangunan liar yang menjadi salah satu penghambat. Pada prinsipnya, apakah itu bangunan liar atau bangunan yang tidak sesuai aturan, ketika prinsipnya tidak sesuai aturan kita ikuti regulasi tetapi juga perlu diingat Kecamatan itu punya kewenangan terbatas, untuk penerbitan kami tidak punya, hanya mengidentifikasi dan melaporkan.

“ Kalau tanahnya perorangan dan seharusnya perorangan tersebut yang melakukan semacam keberatan atau rundingan dengan yang menempati itu. Kalau itu tanah Pemda itu baru disebut bangunan liar sesuai aturan, kalau saya lihat itu tadi kemungkinan bangunan pribadi kan perlu di cek, seperti itu prinsipnya, ” Kalau saya pribadi lebih banyak fasilitasi kalau Kecamatan tidak langsung eksekusi.



Kalau memang itu tanah pribadi apakah akan ada pembebasan lahan agar bisa menjadi luas ? Asmara Hadi menjawab dengan lugas, kalau luas dan tidaknya itu nanti yang punya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten minimal dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) , dari Kecamatan fasilitasi, melaporkan atau mengusulkan sesuai dengan kebutuhan kenyataan kondisi dilapangan. Tetapi yang mengambil kebijakan kepanjangan tangan Bupati adalah yang mengurus jalan adalah Dinas PUBMSDA, sekali lagi Camat tidak punya kewenangan itu, hanya mengusulkan atas dasar kebutuhan mungkin dari warga tadi.

Masih dijelaskan oleh Asmara Hadi, dan Yang ada indikasi bahwa terkait bangunan liar, akan kami identifikasi dulu, baru kita lakukan pelaporan dan sebagainya. Sesuai apa disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Warih Andono bahwa pembangunan akan dilaksanakan pada Tahun 2027, artinya sebelum itu akan kita lakukan, dengan tentunya kita ada jadwal lainnya, mohon waktu sebelum itu kita selesai, pungkasnya.

Post Views: 17

Tag: # Berita hari ini # Kabupaten Sidoarjo
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Berikan Solusi Akses Jalan Karangbong
Topik: # Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Berikan Solusi Akses Jalan Karangbong
Penulis: Yunda Sundari



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Berita, Berita Terkini

Wabup Sidoarjo dan Sekdaprov Duduk Bersama Dengan Anggota DPR RI Komisi Bahas Percepatan Infrastruktur dan Transportasi di Jatim

ADMIN
Februari 23, 2026



Sidoarjo – detikperistiwa.co.id

Anggota DPR RI Komisi V memanfaatkan masa Reses nya dengan melakukan Kunjungan Kerja/Kunker ke Jawa Timur. Pagi tadi, puluhan anggota dewan itu mendatangi Terminal Purabaya yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Senin, (23/2). Kedatangan mereka untuk melihat infrastruktur terminal bus tipe A terbesar di Jawa Timur itu dalam menghadapi mudik lebaran nanti.

Kedatangan rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae disambut Sekdaprov Jatim Adhy Karyono serta Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana dan Direktur Prasarana Transportasi Jalan (DPTJ) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI Toni Tauladan. Setelah dari Terminal Purabaya, rombongan bertolak ke kantor Otoritas Bandara Wilayah III Juanda Sidoarjo untuk menggelar rapat koordinasi percepatan infrastruktur dan transportasi di Jatim. Dalam rapat tersebut juga dibahas dukungan anggaran, sinkronisasi program, serta percepatan realisasi proyek infrastruktur transportasi di Jawa Timur.

Sebelumnya Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengucapkan selamat datang kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI. Disampaikannya kunjungan kali ini menjadi moment strategis dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Timur, khususnya KabupatenSidoarjo. Ia berharap melalui kegiatan seperti ini akan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu lanjut Hj. Mimik, akan memperkuat terwujudnya program-program prioritas infrastruktur di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya mengucapkan selamat datang, semoga kunjungan kali ini akan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program-program prioritas infrastruktur di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sidoarjo yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ucapnya.

Temukan lebih banyak	
Polres Aceh Timur	>
Polsek Pemulutan	>
Polda Sulawesi Selatan	>



sinergi dan kolaborasi antara pemerintahan pusat dan daerah. Dengan begitu lanjut Hj. Mimik, akan memperkuat terwujudnya program-program prioritas infrastruktur di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya mengucapkan selamat datang, semoga kunjungan kali ini akan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program-program prioritas infrastruktur di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sidoarjo yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ucapnya.

Temukan lebih banyak	
Polres Aceh Timur	>
Polsek Pemulutan	>
Polda Sulawesi Selatan	>

Dalam kesempatan itu Wabup Hj. Mimik Idayana menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur di wilayahnya. Seperti persoalan jalan rusak serta banjir yang masih dikeluhkan masyarakat. Ia mengungkapkan, hampir setiap hari menerima laporan terkait kondisi jalan berlubang serta banjir yang belum tertangani secara optimal.

“Hampir tiap hari kami menerima telepon dari masyarakat terkait jalan berlubang dan banjir. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan yang hadir di ruang rapat ini. Kami berharap ada dukungan penuh atas keluhan masyarakat kami, serta kemudahan akses transportasi di

Kabupaten Sidoarjo,” ujar Wabup Hj. Mimik.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan komitmen Komisi V untuk menampung aspirasi daerah dalam percepatan realisasi program pembangunan. Dikatakannya Komisi V akan mendorong percepatan pembangunan di beberapa sektor yang menjadi kewenangannya. Seperti pada sektor perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta pembangunan desa dan daerah tertinggal.

“Melalui forum rapat ini kami berharap kelas jalan baik, kabupaten, provinsi dan kelas jalan nasional tidak ada yang berlubang lagi. Sebab, misalnya terjadi lakalantas di area kelas jalan kabupaten yang bertanggungjawab bupati atau walikota, begitu juga provinsi dan nasional. Oleh sebab itu melalui rapat koordinasi ini kita tampung aspirasi masyarakat mana saja yang perlu kita dukung,” ujarnya saat memimpin rapat.

Sementara itu Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyampaikan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai gerbang perekonomian kawasan Timur Indonesia. Oleh karenanya diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, khususnya dalam peningkatan kualitas dan kemantapan jalan nasional maupun provinsi.

“Tingkat kemantapan jalan nasional di Jawa Timur saat ini mencapai sekitar 98 persen, sedangkan jalan provinsi berada di kisaran 86 persen,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Jatim akan mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran. Diproyeksikan akan ada pergerakan jutaan penumpang melalui moda transportasi darat, laut, dan udara. Adhy Karyono juga mengatakan Pemprov Jatim mendorong pengembangan transportasi massal di kawasan Surabaya Raya.

“Salah satu rencana strategis yang akan kita lakukan adalah proyek kereta rel listrik (KRL) Surabaya–Sidoarjo yang ditargetkan beroperasi pada 2027, serta pengembangan moda transportasi berbasis rel lainnya guna mengurai kemacetan dan memperkuat konektivitas kawasan metropolitan,”ujarnya.luq

■ Dibaca 28





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

EKSKLUSIF.CO.ID



Home Kepolisian TNI DPR MPR Olahraga Pemerintah Kriminal Advetor



Beranda > DPR >

DPR

Atap Kelas 9 B, Di SMPN 1 Gedangan Ambruk Dimakan Rayap, DPRD Sidoarjo Dorong Dikbud Evaluasi Semua Sekolah Rawan Roboh Yang Ada Di Kabupaten Sidoarjo

Meja Redaksi 3 Min Baca
Februari 23, 2026



Sidoarjo, Eksklusif.co.id – Pada waktu Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono Kelihatanya sudah Ambruk, Didalam melaksanakan sidak ke ruang kelas 9 B di SMPN 1 Gedangan ambruk yang ada di Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, 23/02/2026

Memang hal ini sudah jelas ada Peristiwa ambruknya atap ruang kelas 9 B di SMPN 1 Gedangan, Sidoarjo menjadi perhatian serius jajaran legislatif (DPRD) Sidoarjo. Bahkan peristiwa ini,

Maka hal ini sangat menyulut perhatian serius Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Sidoarjo masih sangat minim.

Terutama soal pemetaan sarana dan prasarana bangunan sekolah.

Salah satu perhatian serius itu diberikan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono. Politisi senior Partai Golkar Sidoarjo ini,

Maka dari itu kami memberikan tanggapan langsung terkait kondisi infrastruktur pendidikan yang dinilai rapuh itu.

Bahkan, Warih Andono melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) ke bangunan ruang kelas yang ambruk itu.

“Kami sangat prihatin atas musibah ambruknya bangunan ruang kelas ini.

Peristiwa ini seharusnya tidak terjadi kalau Dinas Pendidikan bisa mengantisipasinya.

Artinya ada mapping (pendataan) bangunan ruang kelas yang rawan ambruk dan mengkhawatirkan,” ujar Wakil Ketua III DPRD Sidoarjo, Warih Andono ini kepada eksklusif.co.id hari Senin (23/02/2026).

Apalagi, berdasarkan tinjauan (Sidak) di lapangan, Warih Andono memastikan kerusakan bangunan ruang kelas itu, murni disebabkan oleh faktor usia dan kondisi fisik material bangunan.



Sidoarjo, Eksklusif.co.id – Pada waktu Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono Kelihatanya sudah Ambruk, Didalam melaksanakan sidak ke ruang kelas 9 B di SMPN 1 Gedangan ambruk yang ada di Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, 23/02/2026

Memang hal ini sudah jelas ada Peristiwa ambruknya atap ruang kelas 9 B di SMPN 1 Gedangan, Sidoarjo menjadi perhatian serius jajaran legislatif (DPRD) Sidoarjo. Bahkan peristiwa ini,

Maka hal ini sangat menyulut perhatian serius Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Sidoarjo masih sangat minim.

Terutama soal pemetaan sarana dan prasarana bangunan sekolah.

Salah satu perhatian serius itu diberikan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono. Politisi senior Partai Golkar Sidoarjo ini,

Maka dari itu kami memberikan tanggapan langsung terkait kondisi infrastruktur pendidikan yang dinilai rapuh itu.

Bahkan, Warih Andono melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) ke bangunan ruang kelas yang ambruk itu.

“Kami sangat prihatin atas musibah ambruknya bangunan ruang kelas ini.

Peristiwa ini seharusnya tidak terjadi kalau Dinas Pendidikan bisa mengantisipasinya.

Artinya ada maping (pendataan) bangunan ruang kelas yang rawan ambruk dan mengkhawatirkan,” ujar Wakil Ketua III DPRD Sidoarjo, Warih Andono ini kepada eksklusif.co.id hari Senin (23/02/2026).

Apalagi, berdasarkan tinjauan (Sidak) di lapangan, Warih Andono memastikan kerusakan bangunan ruang kelas itu, murni disebabkan oleh faktor usia dan kondisi fisik material bangunan.

Warih memastikan penyebab bangunan atap ruang kelas ambruk bukan karena bencana alam seperti angin puting beliung atau lainnya.

Kesehatan Mandiri ke PBI
“Faktor utama bangunan ambruk karena rayap.

Berarti hal ini sudah jelas terlihat semua kayu penyangga atap diketahui sudah sangat lapuk karena dimakan rayap.

Bahkan, kondisi bangunan dan material bangunan sudah tua dan rapuh sehingga tidak mampu lagi menahan beban hingga ambruk itu,” ungkapnya.

Oleh Karena itu, sampai Warih Andono menekankan keprihatinan mendalam atas kejadian ambruknya bangunan ruang kelas itu.

Pihaknya, menekankan beberapa poin penting sebagai langkah tindak lanjutnya.

Diantaranya DPRD Sidoarjo mendorong pemerintah daerah (Pemkab Sidoarjo) untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap gedung-gedung sekolah lain yang sudah berumur.

Hal itu, untuk mencegah kejadian serupa (ambruknya ruang kelas) terulang kembali.

“Soal teknis penggunaan dana APBD yang memerlukan penyesuaian prosedur dan kewenangan untuk perbaikan mendadak seperti ini karena keterbatasan anggaran.

Tercatat adanya kendala mengenai penggunaan dana APBD secara langsung untuk perbaikan mendadak karena prosedur kewenangan yang ada.

Kalau dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tidak bisa maka baru bisa dianggarkan di Tahun 2027.

Karena rehab ruang kelas itu tidak hanya satu ruang saja akan tetapi sampai empat ruang kelas,” tandasnya.

Sementara dalam sidak itu, Warih Andono tidak hanya ditemani Kepala SMPN 1 Gedangan bersama staf dan para guru lainnya.

Abah Warih Andono juga ditemani Kabid Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Sidoarjo.”Jelasnya.

(Ali)

📄 8 kali dilihat , 3 kali dilihat hari ini





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemerintah

Belajar Terancam, Atap Kelas SMPN 1 Gedangan Ambruk – Pemkab Gunakan Skema BTT

Media Sorot Mata 24 Februari 2026



SIDOARJO, [MEDIASOROTMATA.COM](#) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 1 Gedangan setelah menerima laporan ambruknya atap ruang kelas di sekolah itu, Selasa (24/2/2026).

Melihat kondisi bangunan yang rusak itu, Bupati Subandi menegaskan perbaikan harus segera dilakukan demi menjamin keselamatan siswa. Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi satu ruang kelas yang atapnya telah jebol, sementara tiga ruang kelas lainnya dalam kondisi lapuk dan rawan ambruk.

Tak hanya masalah atap, lantai ruang kelas juga kerap tergenang banjir saat hujan deras mengguyur. Melihat kondisi yang memprihatinkan, Pemkab Sidoarjo akan mempercepat proses perbaikan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT).

Hal ini dilakukan agar pengerjaan tidak perlu menunggu proses penganggaran reguler yang memakan waktu lama.

“Hari ini kita sidak bersama Wakil Ketua DPRD, Dinas Pendidikan, Camat, dan Kades. Melihat kondisi seperti ini, tentu harus segera diperbaiki. Anak-anak butuh sekolah yang aman, dan itu tanggung jawab pemerintah daerah,” tegas Subandi.

Subandi merinci bahwa kerusakan mendesak yang harus ditangani adalah pembangunan kembali atap yang ambruk serta penggantian konstruksi kayu yang sudah keropos dengan material yang lebih kokoh. “Ini urgent, terutama pembangunan atap dan peninggian lantai karena sering banjir. Sekalian kita naikkan lantainya supaya tidak banjir lagi, jadi tidak kerja dua kali,” ucapnya.

Berdasarkan perkiraan awal, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 250 juta per ruang kelas. Namun, angka final masih menunggu kajian teknis, termasuk opsi penggunaan rangka baja ringan agar lebih awet.

Pemerintah menargetkan proses kajian teknis selesai dalam waktu dekat agar pengerjaan bisa langsung tancap gas. Harapannya, setelah libur Lebaran, siswa sudah bisa kembali belajar dengan tenang.

“Mudah-mudahan setelah Lebaran anak-anak sudah bisa menikmati kelas yang bagus dan nyaman, tanpa kekhawatiran atap roboh lagi,” pungkasnya. **(NURI)**

Tags:

Atap Kelas SMPN 1 Gedangan Ambruk - Pemkab Gunakan Skema BTT

Belajar Terancam

Popular

Recent

Comment



Rapat PIWK: Bupati Subandi Minta Seluruh Kecamatan Serentak ...

19 Februari 2026 / 2334



Konektivitas Jalan Diperluas, Pemkab Sidoarjo Bongkar Pagar ...

29 Januari 2026 / 1



Wabup Aceh Singkil Terima 1.000 Batang Cabut ... Banjir di ...

13 Januari 2026 / 12



Soal Jalan Karangbong, Begini Penjelasan DPRD Sidoarjo dan Pihak Perusahaan

Redaksi

🕒 24 Februari 2026

3 minutes read



RADAR BLAMBANGAN.COM, |
SIDOARJO – Upaya mencari solusi permanen atas persoalan akses jalan di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, terus bergulir. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kecamatan Gedangan, Senin (23/2/2026), Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, pimpinan 10 perusahaan, serta perwakilan warga duduk bersama guna membahas teknis pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Pandangan DPRD: Fokus pada Kekuatan Infrastruktur

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Warih Andono, S.H., menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat secara teknis agar hasil perbaikan jalan tidak merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Ia menawarkan skema bantuan melalui dana Pokok Pikiran (Pikir) untuk menunjang kebutuhan tersebut.

"Sejak awal, posisi kami di DPRD sangat tegas: permasalahan jalan ini harus tuntas secara kolaboratif. Saya menawarkan penggunaan dana Pokir untuk betonisasi agar jalan ini mumpuni menahan beban kendaraan industri dan manfaatnya awet dirasakan warga," ungkap Warih.

Warih menambahkan bahwa dalam diskusi muncul dinamika mengenai pemilihan material antara beton dan paving. *"Tentu ini akan kami bahas kembali secara mendalam pada pertemuan selanjutnya untuk memastikan kualitas pengerjaan tetap menjadi prioritas utama," jelasnya.*





WATCH

Klarifikasi Perusahaan: Menunggu Rincian Anggaran (RAB)

Menanggapi jalannya rapat, Narso Samsudin, Kepala RDC Sidoarjo (Kepala Gudang) yang mewakili unsur perusahaan, meluruskan kabar mengenai adanya penolakan terhadap rencana perbaikan. Ia menegaskan bahwa pihak industri sangat mendukung rencana ini, namun memerlukan data teknis sebagai dasar pelaporan ke manajemen.

“Tidak ada pernyataan penolakan dari pihak perusahaan terkait betonisasi. Kami hanya meminta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari masing-masing pengerjaan, baik itu untuk jalan maupun drainase sebagai acuan kami untuk dipresentasikan kepada pihak manajemen pusat,” terang Narso.



Mengenai opsi pavingisasi, Narso menjelaskan bahwa usulan tersebut muncul dari inisiatif Kepala Desa Karangbong dan Ketua BPD sebagai solusi untuk jalan alternatif pengurai kemacetan. *“Perusahaan berkomitmen dan siap bertanggung jawab melakukan pengerjaan di depan lokasi masing-masing setelah ada kesepakatan teknis yang jelas,” tambahnya.*

Ansor-Banser Dirikan 99 Posko Ramadan di Sidoarjo, Siap Amankan Mudik 2026

TAMAN-Semangat pengabdian menyambut Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi ditunjukkan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Sidoarjo dengan mendirikan 99 Posko Keamanan Ramadan yang tersebar di 18 Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kabupaten Sidoarjo.

Posko ini tak sekadar simbol kesiapsiagaan, tetapi menjadi garda terdepan pelayanan dan pengamanan masyarakat, khususnya menjelang arus mudik Lebaran.

Pembukaan Posko Ramadan digelar oleh PAC GP Ansor dan Satkoryon Banser Taman di Masjid Ar-Rohman, Trosobo, Kecamatan Taman, Sabtu (21/2).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus MWC NU Taman beserta badan otonom NU seperti Muslimat, Fatayat, IP-NU, IPPNU, serta unsur Forkopimcam Kecamatan Taman.

Ketua MWC NU Kecamatan Taman, Moh Syafi'i menegaskan, Ansor dan Banser memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga masyarakat selama Ramadan hingga momentum mudik.



ANAS/RADAR SIDOARJO

SINERGIS: H Saifuddin Affandi (baju putih) bersama PAC GP Ansor Taman dan stekholder dalam pembukaan Posko Ramadan di Masjid Ar-Rohman Trosobo Taman, Sabtu (21/2).

"Ansor-Banser lahir dari rahim NU dan masyarakat. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga dan melayani masyarakat," ujar Syafi'i, Selasa (24/2).

Menurutnya, mendukung kelancaran dan kenyamanan arus mudik menjadi bagian penting dari pengabdian tersebut. Ia berharap keberadaan posko mampu memberi rasa aman bagi warga yang menjalankan ibadah Ramadan maupun yang bersiap pulang kampung.

Penanggung Jawab Posko

Mudik Banser 2026, Khusnul menyampaikan, posko mudik tahun ini difokuskan pada pelayanan menyeluruh bagi para pemudik.

"Posko mudik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan dukungan menyeluruh bagi para pemudik dalam perjalanan kembali ke kampung halaman," jelasnya.

Ia menilai Lebaran adalah momen sakral yang harus dirayakan dengan penuh khidmat oleh seluruh masyarakat. (nas/dik/vga)



Tumpukan Sampah Menggunung di Jalan Arteri Porong

■ Warga dan Kecamatan
Gotong Royong Bersihkan

PORONG-Bau menyengat yang sempat mengganggu pengguna Jalan Raya Arteri Porong akhirnya hilang. Tumpukan sampah yang menggunung di Dusun Gempol Sampurno, Kelurahan Porong, Sidoarjo, dibersihkan melalui aksi gotong royong petugas kecamatan, perangkat kelurahan, dan warga, Selasa (24/2).

Sejak pagi, petugas bersama Ketua RT dan masyarakat setempat bahu-membahu mengangkat sampah yang sebelumnya dikeluhkan karena menimbulkan aroma tak sedap dan merusak kenyamanan lingkungan.

Lurah Porong, Jumilah, menegaskan bahwa persoalan sam-

pah bukan semata tanggung jawab pemerintah. Ia mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif warga untuk menjaga kebersihan lingkungan.

"Kami mohon kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan tidak hanya selalu menuntut pemerintah."

Sampah adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah. Sampah bukan warisan untuk anak cucu kita," ujar Jumilah kepada Radar Sidoarjo.

Menurutnya, aksi cepat tersebut menjadi langkah awal untuk mengembalikan kondisi lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Namun, ia berharap kesadaran warga terus tumbuh sehingga kejadian serupa tidak terulang.

Sementara itu, Ketua RT 6/

RW 4 Dusun Gempol Sampurno, Lukman, mengakui tumpukan sampah tersebut sudah cukup lama meresahkan warga.

"Masyarakat Gempol Sampurno terganggu dengan bau sampah yang menumpuk. Kami berharap ada solusi dari pemerintah agar kejadian serupa tidak terus terulang," ujarnya.

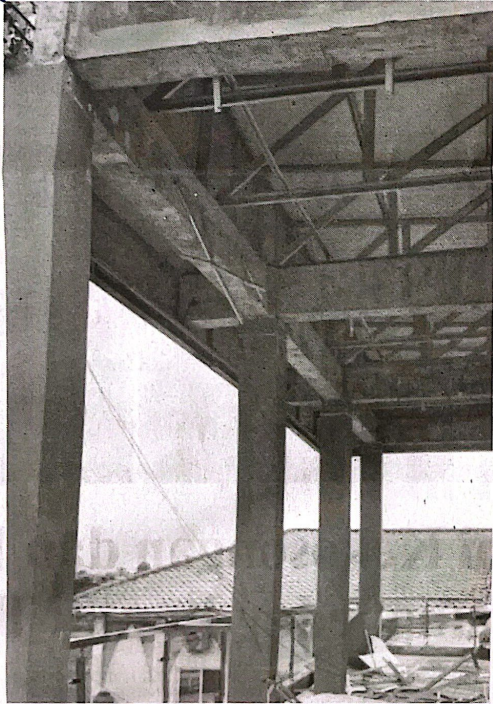
Ia menambahkan, selain mengganggu aktivitas sehari-hari, sampah yang dibiarkan menumpuk juga berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jika tidak ditangani secara berkelanjutan.

Warga pun berharap pemerintah menghadirkan solusi permanen, seperti pengawasan rutin, penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai, serta penindakan tegas terhadap pelaku pembuangan sampah liar. (dik/vga)



KEBERSIHAN: Kepala Kelurahan Porong dan Kasi Pembangunan Kelurahan Porong saat sidak di lokasi tumpukan sampah, Selasa (24/2).





Baru Dibangun dengan APBN, Atap Teras Kelas SMK Ma'arif Tanggulangin Ambrol

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Baru saja direnovasi dengan anggaran kisaran Rp 1 miliar di anggaran APBN 2025, atap teras ruang kelas SMK Ma'arif Tanggulangin sudah ambrol.

Ambrolnya atap teras ruang kelas di lantai 3 ini, tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat.

Pasalnya karena, pemborong belum mendapatkan haknya secara penuh dari nilai kontrak yang disepakati.

Salah satu Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP-3) SMK Ma'arif

Tanggulangin Khoirul Anam, mengaku pihaknya memang menahan (retensi) sekitar 15 persen sisa anggaran yang ada.

"Anggarannya memang belum kita berikan semua, dan memang masih dalam pemeliharaan," ujar Anam saya dihubungi via TLP.

Anam juga menambahkan, kontraktor saat ini masih sakit dan dirawat di rumah sakit.

"Kontraknya masih sakit. Nanti kalau sudah dibetulkan, akan kita cairkan sepuluh persen sisa anggaran," jelasnya.

Sebenarnya retensi atau menahan pembayaran diperbolehkan namun angkanya dikisaran 5 persen.

Retensi pembangunan sekolah diperbolehkan dan sah secara hukum, bahkan umum digunakan dalam kontrak jasa konstruksi pemerintah maupun swasta.

Retensi adalah sejumlah uang pembayaran yang ditahan (biasanya 5% dari nilai kontrak) oleh pemilik proyek (PPK/Sekolah/Dinas) dari kontraktor, yang baru akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai. (Nang)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



ANGGER BONDAN/JAWA POS

RAWAN MELUAP: Satu ekskavator diterjunkan untuk mengeruk Sungai Seruni kemarin (24/2).

Bersih-Bersih Sungai Seruni, Petugas Angkut Dua Ton Sampah

SIDOARJO - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DP-UBMSDA) Sidoarjo bersih-bersih Sungai Seruni hingga Keboananom di wilayah Gedangan kemarin (24/2). Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan banyak sampah dan eceng gondok.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo M. Makhmud mengatakan, pihaknya menurunkan satu alat berat serta truk pengangkut untuk mempercepat pekerjaan. "Pembersihan difokuskan pada tanaman air liar dan sampah

yang tersangkut di badan sungai," katanya kemarin (24/2).

Menurutnya, material yang diangkat cukup banyak. Ada sampah sebanyak ton yang berhasil diangkat. Sampah-sampah tersebut ditemukan di Sungai Seruni. "Setelah pembersihan, maka berlanjut ke pengerukan sedimentasi," ujarnya.

Selain di Gedangan, DPUBMSDA menambah normalisasi di tiga titik lain. Sehingga total ada tujuh titik prioritas normalisasi sebelum lebaran. Masing-masing

di Saluran Pelayaran Desa Krembangan, Kecamatan Taman; Afvour Kemambang Desa Urangagung, Kecamatan Sidoarjo; serta Saluran Mangetan Kanal Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati.

Menurutnya, pengerjaan akan dilakukan bergantian sesuai dengan jumlah alat berat yang ada. "Kami kerahkan satu alat berat beserta truk pengangkut. Kami bersihkan tanaman air dan juga sampah yang tersangkut," ujarnya. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ Warga Rela Patungan Rp 10 Juta untuk Bantu Perbaiki Jalan

Program PIWK Masih Proses Lelang

SIDOARJO -Keluhan jalan rusak di Kota Delta terus bermunculan. Sebagian masyarakat yang tak sabar menunggu pemerintah bergabung dengan kelompok relawan untuk melakukan perbaikan mandiri. Bahkan mereka tak segan untuk patungan demi jalan yang dilalui mulus.

Salah satu warga, Muhammad Suaib menjelaskan jika perbaikan dilakukan bersama teman-temannya. Dia rela mengeluarkan uang Rp

10 juta. "Kami patungan untuk membantu memperbaiki. Kebetulan sudah ada 10 lokasi," katanya. Sebagian jalan yang diperbaiki tersebar di kawasan Buduran.

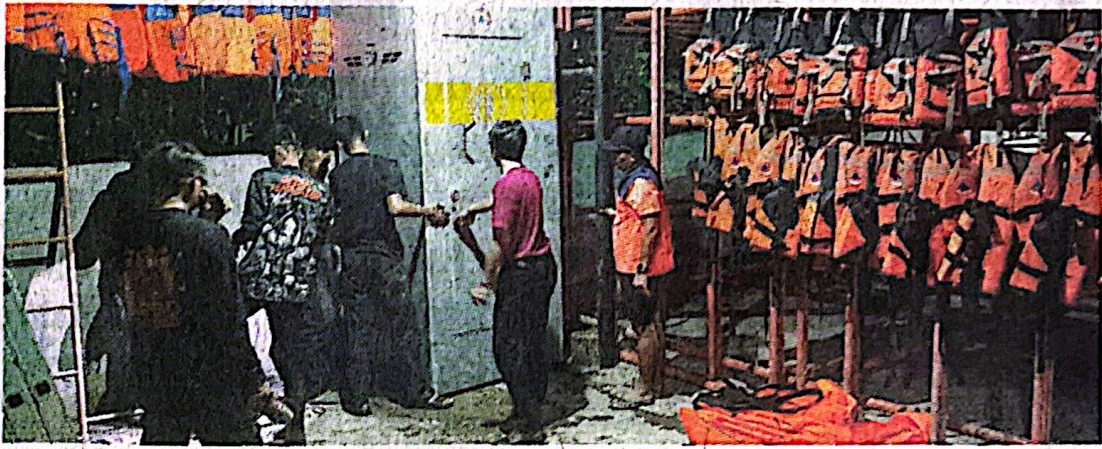
Hingga kemarin (24/2), upaya perbaikan yang dilakukan Pemkab juga terus berjalan. Pemkab sebenarnya sudah menyiapkan Program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Namun saat ini belum bisa dieksekusi. Prosesnya masih tahap lelang.

Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setda Sidoarjo Bahrul Amiq mengatakan

bahwa saat ini tahapan PIWK masih berada pada proses administrasi. Pendampingan telah dilakukan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) bersama para kasi pembangunan kecamatan. "Camat juga telah mendapatkan arahan teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah," katanya.

Amig menyebut, jika seluruh persyaratan administrasi ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Camat diminta tidak menunggu terlalu lama. Awal Maret mereka harus sudah bisa melaksanakan pekerjaan. (eza/hen)

Jawa Pos



BPBD SIDOARJO

SIAGA BENCANA: Petugas BPBD Sidoarjo mengecek peralatan di Posko Hidrometeorologi kemarin (24/2).

Siagakan Posko Hidrometeorologi Selama Ramadan

SIDOARJO – Langkah antisipasi bencana banjir di bulan Ramadan dilakukan BPBD Sidoarjo. Agar bisa bergerak cepat, BPBD menyiapkan Posko Hidrometeorologi yang diaktifkan selama Ramadan. Selain personil, ada peralatan lengkap yang disiapkan di posko tersebut.

Humas BPBD Kabupaten Sidoarjo Yoli Wisnu mengatakan, pihaknya telah menyiapkan posko induk yang siaga 24 jam yang dilakukan dengan sif. Tiap sif nya ada satu tim berisi lima orang. "Posko juga dilengkapi dengan sejumlah peralatan," ujarnya kemarin (24/2). Posko tersebut difungsikan sebagai pusat pemantauan hingga koordinasi. (eza/hen)



Warih Andono saat sidak di SMPN 1 Gedangan, Senin (23/2). foto ist

Warih Minta Dikbud Petakan Sekolah Rawan Roboh

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat melakukan pemetaan terhadap gedung sekolah rawan roboh.

Ini disampaikan saat Warih Andono melakukan sidak di SMPN 1 Gedangan, yang salah satu atap ruang kelasnya ambruk, Senin (23/2).

Politisi Partai Golkar ini sangat prihatin atas musibah ambruknya bangunan ruang kelas ini. Ia menyebut, peris-

tiwa ini seharusnya tidak terjadi kalau Dinas Dikbud bisa mengantisipasinya.

“Artinya ada mapping (pendataan) bangunan ruang kelas yang rawan ambruk dan mengkhawatirkan,” tandas Warih Andono.

Warih menegaskan, hasil sidak di lokasi, kerusakan bangunan ruang kelas itu, murni disebabkan oleh faktor usia dan kondisi fisik material bangunan.

Karena itu, Warih Andono menekankan beberapa poin

penting sebagai langkah tindak lanjutnya. Diantaranya mendorong Pemkab untuk pengecekan menyeluruh terhadap gedung-gedung sekolah lain yang sudah berumur.

Hal itu, untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. “Kalau dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tidak bisa maka baru bisa dianggarkan di Tahun 2027. Karena rehab ruang kelas itu tidak hanya satu ruang saja akan tetapi sampai empat ruang kelas,” tandasnya. (sta/rus)



Anggota Samapta Polsek Buduran saat memberikan bantuan kepada siswa sekolah yang terjatuh di jalan.

Anggota Samapta Polsek Buduran Bantu Siswa Terjatuh

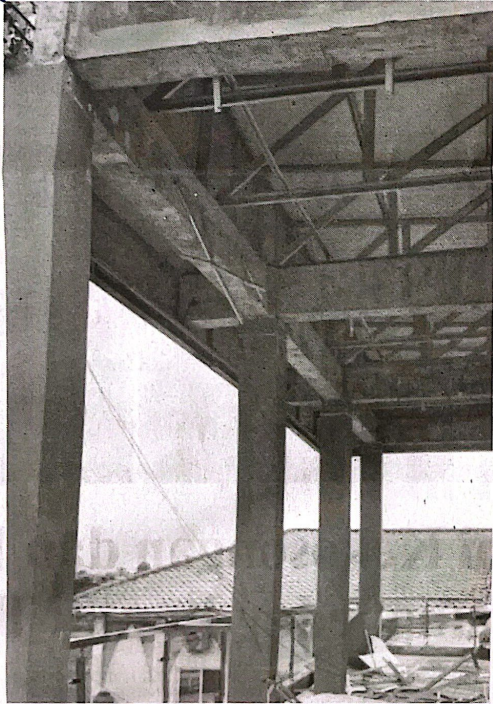
Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Respons cepat dan empati ditunjukkan jajaran kepolisian Polsek Buduran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Briptu Bambang Eko, anggota Samapta Polsek Buduran, sigap memberikan pertolongan kepada seorang siswa sekolah yang terjatuh dari sepeda motor di Jalan Raya Veteran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Selasa 24 Februari 2026.

Insiden tersebut terjadi saat anggota kepolisian tengah melaksanakan tugas rutin pengaturan lalu lintas di pagi hari. Melihat seorang siswa bersama pengendara motor terjatuh di pinggir jalan, Briptu Bambang Eko segera menghampiri korban untuk memberikan bantuan pertama serta memastikan kondisi siswa tersebut aman.

Dengan tenang, Briptu Bambang membantu menenangkan korban yang sempat panik. Setelah memastikan tidak ada luka serius pada fisik siswa tersebut, petugas memberikan dukungan moral agar korban kembali tenang sebelum melanjutkan perjalanan ke sekolah.

Tindakan humanis ini mencerminkan kehadiran Polri yang tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Aksi Briptu Bambang tersebut pun menuai apresiasi positif dari warga sekitar yang menyaksikan kejadian. (md/rus)



Baru Dibangun dengan APBN, Atap Teras Kelas SMK Ma'arif Tanggulangin Ambrol

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Baru saja direnovasi dengan anggaran kisaran Rp 1 miliar di anggaran APBN 2025, atap teras ruang kelas SMK Ma'arif Tanggulangin sudah ambrol.

Ambrolnya atap teras ruang kelas di lantai 3 ini, tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat.

Pasalnya karena, pemborong belum mendapatkan haknya secara penuh dari nilai kontrak yang disepakati.

Salah satu Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP-3) SMK Ma'arif

Tanggulangin Khoirul Anam, mengaku pihaknya memang menahan (retensi) sekitar 15 persen sisa anggaran yang ada.

"Anggarannya memang belum kita berikan semua, dan memang masih dalam pemeliharaan," ujar Anam saya dihubungi via TLP.

Anam juga menambahkan, kontraktor saat ini masih sakit dan dirawat di rumah sakit.

"Kontraknya masih sakit. Nanti kalau sudah dibetulkan, akan kita cairkan sepuluh persen sisa anggaran," jelasnya.

Sebenarnya retensi atau menahan pembayaran diperbolehkan namun angkanya dikisaran 5 persen.

Retensi pembangunan sekolah diperbolehkan dan sah secara hukum, bahkan umum digunakan dalam kontrak jasa konstruksi pemerintah maupun swasta.

Retensi adalah sejumlah uang pembayaran yang ditahan (biasanya 5% dari nilai kontrak) oleh pemilik proyek (PPK/Sekolah/Dinas) dari kontraktor, yang baru akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai. (Nang)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Sidoarjo

Jawa Pos • METROPOLIS | RABU 25 FEBRUARI TAHUN 2026 | HALAMAN 18



“Ini jelas melanggar. Aturannya harus ada berita acara resmi.”

Hariyanto
Inspektur Pembantu
IV Inspektorat
Sidoarjo

Kepala Bidang RTH Bawa Pulang Mobil Kepala Dinas tanpa Izin Resmi

Temuan Inspektorat

SIDOARJO - Inspektorat Sidoarjo dan BKD Sidoarjo telah memanggil Kabid kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (KRTH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Vira Murti Krida Laksmi untuk mengklarifikasi terkait dugaan penggunaan mobil

dinas untuk aktivitas mudik. Inspektorat dan BKD menemukan fakta baru. Vira ternyata tidak hanya membawa pulang kendaraan operasional tempat pembuangan akhir (TPA). Namun, juga sering menggunakan mobil milik Kepala DLHK Sidoarjo tanpa izin resmi atau berita acara pemakaian. Pemakaian mobil jenis Innova Reborn yang seharusnya dipakai Kepala DLHK dinilai tak

sesuai prosedur. Sebab penggunaannya hanya berbekal izin via WhatsApp (WA). “Sudah saya sampaikan langsung kalau hal itu tidak dapat dibenarkan,” tegas Inspektur Pembantu IV Inspektorat Sidoarjo Hariyanto kemarin (24/2).

Menurut dia, setiap penggunaan kendaraan yang bukan haknya harus dilengkapi berita acara resmi. Tanpa dokumen itu, pemakaian dianggap melanggar

aturan. “Ini jelas melanggar. Aturannya harus ada berita acara resmi,” kata Hariyanto.

Masuk Pelanggaran Kode Etik

Kabid Motivasi dan Disiplin BKD Sidoarjo M Faiz Panani membenarkan adanya temuan tersebut. Dia menyebut penggunaan mobil kepala dinas terbukti tidak disertai prosedur administrasi yang semestinya. Temuan masuk ranah pelanggaran kode etik.

“Seharusnya ada berita acara penggunaan kendaraan,” jelasnya. Terkait sanksi, Faiz mengatakan jika saat ini masih proses pembahasan. Belum ditentukan soal sanksi yang akan diberikan.

Saat dikonfirmasi Vira menyebut jika dirinya sudah izin untuk menggunakan mobil kepala DLHK. Adapun izin tersebut disampaikan via WA. “Sudah izin lewat WA,” katanya. (fal/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO



- [Home](#) [Berita](#) [Pendidikan](#) [MEDIASOROTMATA.COM.TV](#) [TNI/POLRI](#) [Wisata](#)
- [Tentang Kami](#) [Redaksi](#) [Media Siber](#) [UU Pers](#)

Pemerintah

Tak Ingin Pengendara Jadi Korban, Bupati Subandi Pastikan Jalan Sukodono Mulus Sebelum Lebaran

Media Sorot Mata 24 Februari 2026



SIDOARJO, MEDIASOROTMATA.COM – Bupati Sidoarjo, H. Subandi terus memantau pelaksanaan perbaikan jalan rusak di berbagai titik di Kabupaten Sidoarjo. Bahkan, dalam momen tertentu, bupati juga turun langsung meninjau proyek yang sedang berjalan.

Seperti yang dilakukan saat melihat langsung proyek perbaikan di dua ruas jalan utama Kecamatan Sukodono, yakni Jalan Kebonagung-Sukodono dan Sukodono-Ponokawan, Selasa (24/2/2026).

Dalam tinjauan tersebut, Subandi menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo untuk tidak main-main dengan kualitas material. Ia menekankan penggunaan teknik overlay menggunakan aspal hotmix.

Subandi meminta kontraktor memastikan ketebalan aspal mencapai minimal 4 cm. Menurutnya, penggunaan aspal coolmix sudah tidak memadai untuk beban jalan di wilayah tersebut.

“Saya minta tolong kontraktornya agar materialnya betul-betul yang bagus. Kalau pakai aspal coolmix tidak mampu, kita harus pakai aspal hotmix, minimal ketinggian tiga sampai empat senti,” tegas Subandi di lokasi.

Jalan yang sedang dikerjakan itu, rinciannya untuk ruas Kebonagung-Sukodono sepanjang 4 km, sedangkan pemeliharaan ruas Sukodono-Ponokawan sepanjang 5 km.

Bupati menegaskan bahwa pengawasan terhadap titik-titik jalan berlubang akan terus dilakukan secara intensif. Ia ingin memastikan tidak ada lagi lubang jalan yang membahayakan pengendara saat memasuki bulan Ramadan dan Lebaran nanti.

“Ini terus kita kawal bersama Asisten II, Kadis PU, Camat, hingga Kades. Mudah-mudahan perbaikan jalan yang kita lakukan hari ini sudah selesai pada bulan Ramadan ini. Sehingga saat lebaran nanti semua jalan sudah bagus,” imbuhnya.

Mengingat ruas Kebonagung-Sukodono kerap dilalui kendaraan berat seperti truk dan kontainer, Subandi mengungkapkan bahwa solusi permanen berupa betonisasi telah masuk dalam rencana jangka panjang.

“Tahun ini kita ada 9 titik betonisasi. Untuk ruas ini (Kebonagung-Sukodono), insyaallah tahun 2027 kita laksanakan betonisasi karena memang lalu lintas kendaraan beratnya padat,” pungkasnya. **(NURI)**

Tags:

Bupati Subandi Pastikan Jalan Sukodono Mulus Sebelum Lebaran

Tak Ingin Pengendara Jadi Korban



- [Popular](#) [Recent](#) [Comment](#)
- Rapat PIWK: Bupati Subandi Minta Seluruh Kecamatan Serentak ...
19 Februari 2026 / 14
- Konektivitas Jalan Perluas, Pemkab Sidoarjo ...
29 Januari 2026 / 2311
- Wabup Aceh Singkil Tanam 1.000 Batang Cabai Pasca Banjir di ...
13 Januari 2026 / 2272

